ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

AHMAD CHABIBILLAH

B200 140 336

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

AHMAD CHABIBILLAH

B 200 140 336

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

(Drs. Wahyono, M.A.,Akt)
NIDN. 0009035801

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)

Oleh:

AHMAD CHABIBILLAH
B 200 140 336

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 07 Februari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Drs. Wahyono, M.A.,Akt.** (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Noer Sasongko, S.E., M.Si., Akt** (.....)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. **Andy Dwi Bayu Bawono, S.E., M.Si., Ph.D** (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

(Dr. Syamsudin, M.M)
NIDN. 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya akan memperanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Februari 2019

Penulis

AHMAD CHABIBILLAH

B200140336

ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)

Abtrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel 100 Kabupaten/Kota. Data penelitian ini menggunakan data sekunder Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016 yang diperoleh melalui situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id). Analisis menggunakan uji asumsi klasik dan kemudian diuji hipotesis dengan metode regresi linier berganda dengan uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum (DAU) mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, dan Kemandirian Keuangan daerah.

Abstract

This research aims to analyse the influence of public allocation fund (DAU), special allocation fund (DAK), Share Allocation Fund (DBH), and capital expenditure to the level regional financial independence at Government of Regency/Municipality in the Province of Central Java in 2014-2016. Population in this research is all Regency/Municipality in the Province of Central Java in 2014-2016. This research uses porposive sampling method. This research uses a sample of 100 regencies/municipalities. This research data using secondary data obtained from budget realization report at Regency/Municipality in the Province of Central Java in 2014-2016 published by Directorate General of Financial Balance (www.djpk.depkeu.go.id). Analysis using classical assumption test and then tested hypothesis using multiple linear regression method with coefficient of determination test, F test, and t test. The results showed that the variables of public allocation fund (DAU) affect the level regional financial independence. Meanwhile, variable of special allocation fund (DAK), Share Allocation Fund (DBH), and capital expenditure has no effect to the level regional financial independence.

***Keywords**: Public Allocation Fund, Special Allocation Fund, Share Allocation Fund, Capital Expenditure and The Level Regional Financial Independence.*

1. PENDAHULUAN

Reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Akuntansi keuangan daerah adalah salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik

yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut ditandai dengan digantikannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi langkah awal dalam memulai otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan akan semakin mandiri dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing, sebab daerah diberikan kebebasan untuk mengelola wilayahnya sendiri (Mardiasmo, 2002:59).

Otonomi daerah dicirikan dengan adanya desentralisasi fiskal, dimana perumusan dan pelaksanaan APBD menjadi tanggung jawab masing-masing daerah. Desentralisasi fiskal menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu daerah dengan daerah yang lain dapat menjadi sangat beragam. Perbedaan ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus pandai mengelola semua potensi daerahnya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di samping itu, penyusunan anggaran daerah juga harus mengedepankan pendekatan anggaran dengan berbasis kinerja atau prestasi kerja (Bawono, 2015). Pola penganggaran tersebut dijelaskan sebagai proses penganggaran yang harus berorientasi pada pencapaian kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dibandingkan pada menghabiskan masukan (input) saja dengan konsekuensi penekanan penyusunan yang lebih partisipatif dan dilaksanakan oleh seluruh manajer baik dari tingkat bawah sampai atas (Bawono, 2008).

Diberlakukannya paket undang-undang otonomi daerah dan keuangan negara tersebut tentunya memiliki tujuan yaitu agar terciptanya suatu kemandirian daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka desentralisasi. Menurut Halim (2007:232), kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh oleh setiap Pemerintah Kabupaten/ Kota dibandingkan dengan pendapatan yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat atau pun dari pinjaman. Selain PAD kemandirian keuangan daerah juga disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Di samping itu, terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan hal yang utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semantara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta berbagai bentuk transfer lainnya dari Pemerintah Pusat semestinya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sehingga tingkat ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam pembiayaan daerahnya semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tingkat ketergantungan tersebut, maka suatu daerah dapat dikatakan mandiri (Ikasari,2015).

Pendapatan asli daerah (PAD) suatu daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas fiskal mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah dalam bentuk belanja modal yang lebih besar untuk

sektor-sektor produktif. Pemberian porsi belanja modal yang lebih besar dimaksudkan untuk peningkatan investasi modal serta pembangunan berbagai fasilitas modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Adi, 2006) dalam Yulianto (2018).

Namun, dalam implementasi otonomi daerah terdapat kendala yang dihadapi salah satunya adalah adanya disparitas (kesenjangan) fiskal antar daerah. Sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi fiskal saat ini masih didominasi oleh bantuan dari Pemerintah Pusat baik dalam bentuk DAU, DAK dan DBH. Realitas menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas dari pemerintah pusat didalam mengatur rumah tanggga daerah. Secara rata-rata nasional, PAD hanya memberikan kontribusi 12-15% dari total penerimaan daerah, sedangkan kurang lebih 70% masih menggantungkan bantuan dari Pemerintah Pusat (Kemendagri).

Sarug dan Sagbas (2008) dalam Ariani dan Putri (2016) menemukan bahwa dana transfer kepemerintah daerah (*intergovermental transfer*) dapat menjadi subtitusi ataupun dapat menjadi stimulus dalam belanja daerah. Apabila efek substitusi ditemukan maka pemerintah daerah akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih sedikit dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat yang mereka terima yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan pajak. Sebaliknya apabila efek stimulus yang ditemukan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan upaya pajak daerahnya. Akan tetapi pemberian DAU yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah, daerah tidak menjadi lebih mandiri semakin bergantung pada pemerintah pusat (Adi, 2008) dalam Ariani dan Putri (2016). Pemberian DAU yang semula bertujuan untuk mengurangi kesenjangan horizontal, justru menjadi disinsentif bagi daerah untuk mengupayakan peningkatan kapasitas fiskal daerahnya. Upaya pajak menjadi lebih rendah, harapan adanya peningkatan kemandirian daerah justru menjadi semakin jauh.

Sementara meningkatnya porsi anggaran belanja modal tidak selamanya diiringi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut diduga karena adanya kecenderungan penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal yang rendah, jauh

dibawah porsi dana yang telah ditetapkan dalam APBD dan belanja modal yang terjadi masih kurang merata sehingga dapat menyebabkan ketimpangan antar daerah. Fenomena tersebut disinyalir akan menghambat pembangunan infrastruktur yang akan mengakselerasi kegiatan perekonomian yang kemudian berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja modal pemerintah daerah (Imawan dan Wahyudin, 2014).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)''.**

2. METODE

2.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kabupaten/Kota.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan kriteria Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah menerbitkan Laporan Realisasi APBD berturut-turut antara tahun 2014-2016 pada situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.depkeu.go.id).

2.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

2.2.1 Variabel Dependen

2.2.1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2008:232) Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Halim (2001:263) Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan

asli daerah. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila semakin kecil tingkat ketergantungannya. Rumus menghitung rasio kemandirian dalam penelitian ini adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} X100\% \qquad (1)$$

2.2.2 Variabel Independen

2.2.2.1 Dana Alokasi Umum

Menurut Halim (2001:127) Dana alokasi umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Variabel ini diukur melalui besarnya realisasi dana alokasi umum yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

2.2.2.2 Dana Alokasi Khusus

Menurut Mudrajad Kuncoro (2015: 70), Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Oleh karena itu, alokasi yang di distribusikan pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Variabel ini diukur melalui besarnya realisasi dana alokasi khusus yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

2.2.2.3 Dana Bagi Hasil

Menurut Yani (2002:46), Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Semakin besar persentase dana yang dibagihasilkan kepada daerah maka semakin besar kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap penerimaan daerah, sebaliknya semakin kecil persentase dana yang dibagihasilkan kepada daerah maka semakin kecil kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap penerimaan daerah. Variabel ini diukur melalui besarnya realisasi dana bagi hasil yang diperoleh daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

2.2.2.4 Belanja Modal

Belanja dalam proses penganggaran daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagai bagian dari Belanja Daerah, menurut Darise (2007:148) belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembeliaan / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan,

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan belanja modal lainnya. Variabel ini diukur melalui besarnya realisasi belanja modal daerah kabupaten/kota pada setiap tahun anggaran.

Uji hipotesis ini menggunakan metode analisis regresi berganda (Multiple Linear Regression Method). Analisis ini digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah :

$$KKD_t = \alpha + \beta_1 DAU_t + \beta_2 DAK_t + \beta_3 DBH_t + \beta_4 BM_t + \varepsilon$$

Keterangan:

KKD = Kemandirian keuangan daerah
α = Konstanta
β = Koefisien jalur
t = Tahun penelitian
DAU = Dana alokasi umum
DAK = Dana alokasi khusus
DBH = Dana bagi hasil
BM = Belanja modal
ε = Error

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusi normal, tidak mengandung autokorelasi, multikoloniaritas, dan heteroskedastisitas.

3.2 Uji Normalitas

Cara untuk menguji normalitas adalah dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menentukan normalitas distribusi residual. Jika sig atau p-value > 0,05 maka data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan menggunakan *one sample Kolmogorov Smirnov test* adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Normalitas

Variabel	p-value	Ketentuan	Kesimpulan
Unstandardized Residual	0,258	> 0,05	Distribusi data normal

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel *unstandardized residual* memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa distribusi data normal.

3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji *Durbin-Watson*.

Tabel 2. Uji Autokorelasi

Durbin-Watson	Ketentuan	Kesimpulan
2,017	DU < DW < 4-DU	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,017 dimana nilai DU sebesar 1,7575, sedangkan untuk nilai 4-DU memiliki nilai sebesar 2,2425. Nilai tersebut berada pada ketentuan DU < DW < 4-DU, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

3.4Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dengan melihat besarnya *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila *tolerance* < 0,10 dan nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Dana alokasi umum	0,618	1,619	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana alokasi khusus	0,582	1,720	Tidak terjadi multikolinearitas
Dana bagi hasil	0,795	1,258	Tidak terjadi multikolinearitas
Belanja Modal	0,433	2,308	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data sekunder diolah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance*>0,10 dan nilai VIF<10, maka dapat disimpulkan tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

3.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan dengan Uji Glejser. Nilai probabilitas lebih dari 0,05 maka diketahui bahwa tidak ada hubungan anatara variabel

independen dengan nilai residual sehingga menunjukkan tidak adanya masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	p-value	Ketentuan	Kesimpulan
Pendapatan asli daerah	0,239	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana alokasi umum	0,858	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Dana alokasi khusus	0,475	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Belanja modal	0,471	>0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data sekunder diolah,2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.6 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.

Tabel5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	t_{hitung}	Sig.	Keterangan
Konstanta	25,671	18,331	0,000	
Dana alokasi umum	-1,269E-005	-6,992	0,000	H1 diterima
Dana alokasi khusus	4,303E-006	1,047	0,298	H2 ditolak
Dana bagi hasil	-1,786E-005	-1,478	0,143	H3 ditolak
Belanja modal	4,158E-006	1,133	0,260	H4 ditolak
R^2	0,387			
Adjusted R^2	0,362			
F_{hitung}	15,018			
Sig	0,000			

Sumber :Data sekunder diolah,2018

3.7 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian variabel dana alokasi umum diperoleh t_{hitung} sebesar -6,992 < t_{tabel} sebesar -1,98525 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < batas signifikansi sebesar 0,05, maka Ho diterima dan H2 diterima. Hal tersebut berarti dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Pengaruh dana alokasi umum yang signifikan ini mengindikasikan bahwa daerah masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan daerah. Arah

koefisien dana alokasi umum yang negatif berarti ketika dana alokasi umum meningkat maka kemandirian keuangan daerah akan menurun, apabila terjadi penurunan terhadap dana alokasi umum maka kemandirian keuangan daerah akan meningkat. Dana alokasi umum merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin kecil dana alokasi umum dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian transfer pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga kemandrian daerah akan terwujud.

3.9 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian variabel dana alokasi khusus diperoleh t_{hitung} sebesar 1,047 < t_{tabel} sebesar 1,98525 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,298 > batas signifikansi sebesar 0,05, maka Ho diterima dan H_3 ditolak. Hal tersebut berarti dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah serta lingkungan hidup. Pemerintah pusat memberikan dana alokasi khusus dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mensejahterakan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan dana alokasi khusus yang dibagikan pada setiap Kabuputen/Kota di Provinsi Jawa Tengah relatif kecil dibandingkan dengan dana alokasi umum, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besar dana alokasi khusus yang dialokasikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemadirian keuangan daerah.

3.10 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian variabel dana bagi hasil diperoleh t_{hitung} sebesar -1,478 > t_{tabel} sebesar -1,98525 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,143 > batas signifikansi sebesar 0,05, maka Ho ditolak dan H_4 ditolak. Hal tersebut berarti dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Dana bagi

hasil merupakan komponen dana perimbangan yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan otonomi daerah karena penerimaannya didasarkan atas potensi daerah penghasil sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah selain dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Oleh karena itu, jika pemerintah daerah menginginkan transfer bagi hasil yang tinggi maka pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan potensi pajak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing masing daerah, sehingga kontribusi yang diberikan dana bagi hasil terhadap pendapatan daerah dapat meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dikarenakan dana bagi hasil yang dibagikan pada setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih relatif kecil dibandingkan dana alokasi umum, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besar dana bagi hasil yang dialokasikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemadirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

3.11 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil pengujian variabel belanja modal diperoleh t_{hitung} sebesar 1,133 < t_{tabel} sebesar 1,98525 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,260 > batas signifikansi sebesar 0,05, maka Ho diterima dan H_5 ditolak. Hal tersebut berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah terbukti secara statistik. Meningkatnya porsi anggaran belanja modal tidak selamanya diiringi dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu daerah yang merupakan indikator kemandirian keuangan daerah. Hal tersebut karena terdapat kecenderungan penyerapan dan realisasi anggaran belanja modal yang rendah, jauh dibawah porsi dana yang telah ditetapkan dalam APBD dan belanja modal yang terjadi masih kurang merata sehingga menyebabkan ketimpangan antar daerah. Fenomena tersebut disinyalir akan menghambat pembangunan infrastruktur yang akan mengakselerasi kegiatan perekonomian yang kemudian berpengaruh terhadap penerimaan PAD yang diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran belanja modal pemerintah daerah. Hal ini membuktikan bahwa seberapa besar porsi anggaran belanja modal tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, variabel dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

4.2 Keterbatasan

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang meliputi ruang lingkup yang hanya mencakup data dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara statistik dan informasi tertulis tentang APBD pada tahun 2014-2016 dan penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal yang digunakan untuk menganalisis pengaruh-pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu kemandirian keuangan daerah sehingga hasil penelitian ini belum dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, serta penelitian ini hanya menggunakan data sekunder laporan realisasi APBD yang datanya masih kurang lengkap dan sangat membatasi alur penelitian, sehingga hal ini menjadikan hasil penelitian ini tidak mewakili pembahasan yang benar-benar menjadi permasalahan dari kemandirian keuangan daerah dan pada akhirnya tidak dapat digeneralisasikan menjadi suatu penelitian yang kredibel.

4.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dikemukakan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan ruang lingkup secara lebih luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan akurat serta bisa memberikan gambaran yang lebih rill tentang kemandirian keuangan daerah dengan menggabungkan laporan rencana dan realisasi anggaran dari berbagai instansi terkait. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih banyak menggunakan variabel independen dan untuk menggunakan variabel moderating sebagai bagian dari interaksi yang diduga mampu menjelaskan secara maksimal variasi terhadap variabel dependen. Penelitian selanjutnya disarankan agar mengambil sampel kabupaten dan kota di luar Daerah Jawa Tengah, agar dapat membandingkan apakah hasil penelitian ini berlaku untuk kabupaten/ kota di luar Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, Kurnia Rina dan Putri, Gustita Arnawati. 2016. "Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah". ISSN. 2460-0784.

Bawono, Andy Dwi Bayu. 2008. "Keadilan Prosedural dalam Hubungan antara Budgetary Goal Characteristic dan Kinerja Manajerial Pejabat Pemerintah". Jurnal Akuntansi dan Keuangan.Volume 7, Nomor 2, September, Hlm. 151-161.

Bawono, Andy Dwi Bayu. 2015. "The role of performance based budgeting in the Indonesian public sector". (Doctoral dissertation, Department of Accounting and Corporate Governance, Faculty of Business and Economics, Macquarie University).

Darise, Nurlan. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Indeks.

Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi ke tiga. Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Ikasari, Putri. 2015. "Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014)". Artikel. Universitas PGRI Yogyakarta.

Imawan, Riswanda, dan Wahyudin, Agus. 2014. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2010-2012. Accounting Analysis Journal. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.

Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Mudrajad, Kuncoro. 2015. Otonomi Daerah: menuju era pembangunan daerah. Jakarta: Erlangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik, Indonesia. 1979. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Republik, Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik, Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Republik, Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Republik, Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Yulianto, Andri. 2018. " Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016)". Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

http://www.keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/23-dau-pegang-peranan-penting-untuk-pembangunan-daerah

www.djpk.depkeu.go.id